

# SAYEEDA WARSI

Britain's First Muslim Government Minister

LONDON  
SPEAKER  
BUREAU



Baroness Warsi adalah seorang pengacara, politisi dan anggota House of Lords. Dia adalah ketua bersama Partai Konservatif dari 2010-12 dan Muslim wanita pertama yang menghadiri kabinet.

Warsi bertugas di Kabinet Perdana Menteri David Cameron, pertama sebagai Menteri tanpa portofolio dari 2010-12, kemudian sebagai Menteri Senior Negara di Kantor Luar Negeri. Dia mengundurkan diri dari pemerintah karena ketidaksepatannya dengan kebijakan Pemerintah tentang Israel - Konflik Gaza pada 2014.

## Topics

- Creativity
- Economics
- Entrepreneur
- Finance
- Government
- Innovation
- Leadership
- Motivation
- Politics

Warsi belajar hukum di Universitas Leeds, sebelum mulai bekerja untuk Layanan Kejaksaan Mahkota sebelum mendirikan praktik hukumnya sendiri. Dia kemudian bergabung dengan Partai Konservatif, dan di sanalah dia menjadi Wakil Ketua dan penasihat pemimpin, Michael Howard, pada tahun 2004. Dia berdiri sebagai kandidat Parlemen di kota kelahirannya pada tahun berikutnya. Pada 2007, ia diangkat ke House of Lords yang berusia 36 tahun, menjadikannya rekan termuda di Parlemen.

Latar belakang bisnisnya dan hasratnya untuk manufaktur telah membuatnya menjadi juara bagi bisnis Inggris baik di dalam maupun luar negeri. Warsi telah menjadi pendorong utama dari tiga bisnis baru; satu di sektor jasa dan dua di bidang manufaktur.

Warsi mengetuai Kelompok Keuangan dan Investasi Islam Global untuk Pemerintah Inggris dan bertanggung jawab atas pengenalan obligasi Sukuk pertama di luar dunia Islam. Grup ini terdiri dari anggota dari pusat keuangan Islam utama, termasuk Kepala Eksekutif dan Gubernur Bank Sentral.

Warsi juga mempelopori agenda Aksi Sosial partai Konservatif baik di dalam negeri maupun internasional, mendirikan Proyek Maja, yang telah menyatukan para politisi dan sukarelawan di bagian-bagian termiskin di Bosnia Herzegovina dan Bangladesh.

Warsi juga Ketua Yayasan, yang berfokus pada tiga bidang program: mobilitas sosial, kesetaraan gender dan kebebasan berkeyakinan.